

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Upaya perbaikan gizi dilakukan dengan meningkatkan kesadaran melalui kegiatan penyuluhan dan pelatihan yang berbasis masyarakat dengan isi pesan di fokuskan pada tewujudnya keluarga sadar gizi, agar mereka dapat mengenal dan mencari penyelesaian masalah pangan dan gizi. Secara khusus perhatian harus diarahkan pada kelompok rentan yaitu : bayi, anak balita, dan wanita usia subur termasuk ibu hamil dan menyusui.

Dalam kehidupan bermasyarakat harus timbul kepedulian pada lingkungan termasuk kebersamaan memerangi kekurangan pangan dan peduli gizi buruk, sehingga tidak memproduksi generasi penerus "*empty brains*" dalam artian fisik, yaitu sel otak tidak terbentuk secara penuh karena pembentukan dan pertumbuhan sel otak terjadi sangat pesat selama usia 2 tahun pertama, yaitu 80 %, dan sisanya sebanyak 20 % terjadi pada usia antara 2 sampai 5 tahun. Setelah itu, pertumbuhan sel-sel otak praktis statis (Departemen Kesehatan, 2002). Dengan demikian sumber daya masyarakat dapat dipersiapkan seoptimal mungkin sehingga produktifitas individu masyarakat dan bangsa meningkat. Untuk mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan gizi buruk diperlukan edukasi dan sosialisasi dengan menitik beratkan strategi komunikasi di masyarakat.

Pelayanan gizi merupakan bentuk intervensi yang dalam jangka pendek harus dapat merubah keadaan gizi masyarakat. Segi efektivitas pelayanan gizi harus sudah menjadi pertimbangan, yang berarti pelayanan harus semakin bermutu dengan berorientasi pada jaminan kualitas. Masih lemahnya mutu pelayanan akibat belum diterapkannya jaminan kualitas pelayanan menjadi sebab terjadinya variasi maupun deviasi, yang menurunkan efektivitas pelayanan gizi. Selain masalah mutu, pelayanan gizi harus menjangkau masyarakat luas. Masih sering terjadinya cakupan pelayanan gizi yang rendah menjadi sumber kesulitan untuk mendapatkan kinerja program gizi yang optimal.

Belum optimalnya koordinasi antar sektor menjadi salah satu titik pusat kelemahan kinerja berbagai program pangan gizi di Kabupaten Kuningan. Oleh karena itu, keberadaan pemerintah Kabupaten Kuningan dapat berperan sebagai koordinator lintas sektoral di bidang pangan dan gizi. Disamping itu pula perlu ditingkatkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak termasuk swasta, dunia usaha, LSM, organisasi sosial kemasyarakatan. Dengan sinergitas yang mantap diharapkan masalah pangan dan gizi diselesaikan dalam waktu cepat dan tepat sehingga kebutuhan pangan dan gizi bias terpenuhi serta dapat mendeteksi kelainan gizi sedini mungkin.

Secara politis program kesehatan termasuk program gizi masuk dalam 3 (tiga) besar prioritas pembangunan, yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, namun prioritas tersebut belum tercermin dalam dukungan anggaran. Berdasarkan

keepakatan Bupati/Walikota tanggal 28 Juli 2000 untuk menyediakan alokasi dana kesehatan minimal 15% dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), namun untuk Kabupaten Kuningan belum terealisasi, sehingga program penanggulangan gizi berjalan belum optimal termasuk pengadaan media informasi, sosialisasi, dan terbentuknya pusat informasi pangan dan gizi.

B. SARAN

Saran dari peneliti berkenaan dengan penelitian strategi komunikasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan dalam hal sosialisasi penanggulangan gizi buruk serta untuk melaksanakan kebijakan pangan dan gizi tersebut adalah Pelaksanaan pelatihan *capacity building* terhadap petugas gizi, meliputi kemampuan komunikasi dalam penyuluhan kesehatan dengan media yang bisa diterima oleh masyarakat serta kemampuan komunikasi untuk melakukan koordinasi agar menjadi momentum untuk pendayagunaan segenap potensi bagi kepentingan program pangan dan gizi di setiap wilayah atau kecamatan.

Semua kebijakan pembangunan nasional dan daerah yang sedang atau akan dilaksanakan harus berdampak pada tingkat kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Untuk terselenggaranya pembangunan yang memberikan kontribusi positif pada kesehatan perlu dilaksanakan advokasi dan sosialisasi sehingga semua pihak yang terkait *stakeholders* memahami, menjabarkan secara operasional, dan memberikan dukungan sumber daya program yang maksimal, sehingga pencapaian program penanggulangan gizi buruk dapat berdayaguna dan berhasilguna.

Perlu diupayakan peningkatan anggaran untuk program penanggulangan gizi buruk, sehingga program dapat berjalan optimal dengan dukungan upaya advokasi dan sosialisasi program penanggulangan gizi buruk.

Perlu meningkatkan advokasi kepada *stakeholders* yang terkait dalam program penanggulangan gizi buruk sehingga tercipta kerjasama kemitraan, kepedulian dan keikutsertaan dalam program sosialisasi dan penanggulangan gizi buruk.

Perlu meningkatkan media komunikasi yang ada baik melalui media massa, penyebaran leaflet, maupun media penyiaran, sehingga informasi tentang pangan dan gizi serta upaya penanggulangannya dapat diketahui luas oleh masyarakat.

Dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia berkualitas sedini mungkin, maka program pangan dan gizi perlu diprioritaskan sehingga pelaksanaan program mendapat dukungan dari *stakeholders* pemerintah daerah Kabupaten Kuningan, lintas sector terkait, dunia usaha, LSM bidang kesehatan gizi, serta masyarakat.